

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOLAKA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka untuk memenuhi kewajiban dan menjawab segala harapan serta tantangan di masa yang akan datang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014) bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan ini disusun berdasarkan Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan yang telah diturunkan (*cascade*) dari Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik. Hal ini karena didukung oleh komitmen dari seluruh unit kerja dalam mencapai sasaran.

Semoga hal ini berfungsi sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka secara bertahap dan berkesinambungan.

Kendari, 30 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kolaka,



Ditandatangani secara elektronik
Arief Hartono



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
C. Sistematika Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KERJA	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Organisasi	9
B. Realisasi Anggaran.....	56
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	58
D. Kinerja Lain-lain	59
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD). Penyusunan laporan kinerja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2024, dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024. Oleh karena itu di pandang perlu untuk dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka Tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Pasal 58 PMK nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 59 dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka termasuk ke dalam KPP Pratama Kelompok II. Pasal 61A menjelaskan tentang struktur organisasi dari KPP Pratama Kelompok II yang terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka meliputi daerah administrasi Kabupaten Kolaka, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Kolaka Utara. Jumlah pegawai KPP Pratama Kolaka per 31 Desember 2024 adalah 83 pegawai yang terdiri atas 1 Kepala Kantor, 10 Pejabat Pengawas, 24 Account Representative, 1 Fungsional Penyuluh Pajak, 3 Asisten Penyuluh Pajak, 5 Fungsional Pemeriksa Pajak, dan 39 Pelaksana. Dengan jumlah pegawai pria berjumlah 52 orang dan pegawai wanita berjumlah 31 orang.

C. Sistematika Laporan

Secara sistematis laporan ini disusun sebagai berikut:

Ringkasan Executive

Pada ringkasan executive akan berisi rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Daftar Isi

Daftar isi akan berisi Daftar isi Laporan Kinerja KPP Pratama Kolaka beserta nomor halamannya.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan berisi penjelasan umum organisasi yang diuraikan dalam beberapa bagian yaitu latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kerja

Pada bab ini akan diuraikan ringkasan atau ikhtisar terkait dengan perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini akan diuraikan terkait dengan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, serta evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini akan diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Lampiran akan berisi perjanjian kinerja tahun 2024 dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya. Hal-hal yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam periode lima tahun ini tertuang dalam Renstra DJP Tahun 2020-2024. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi kementerian keuangan: “menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan”. Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah pertama merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, kedua meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil, dan yang ketiga yaitu mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi.

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020-2024 yaitu pengelolaan fiscal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, dan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuannya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan lima sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiscal yang sehat dan berkelanjutan adalah **kebijakan fiscal yang ekspansif dan konsolidatif**
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah **penerimaan negara dari sector pajak yang optimal**
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien adalah
 - a. **Organisasi dan SDM yang optimal.**
 - b. **Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.**
 - c. **Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.**

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka telah dilakukan pada awal tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja nomor PK-14/WPJ.15/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan Perjanjian Kinerja nomor PK-26/WPJ.15/2024. Dalam perjanjian kinerja tersebut terdapat 10 sasaran strategis yaitu:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Sepuluh sasaran strategis tersebut telah mengakomodir sasaran strategis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam Renstra Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Berikut merupakan sepuluh sasaran strategis dan indikator kinerja utama:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%

9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi diukur dari pengukuran kinerja yang telah dicapai KPP Pratama Kolaka yang ditampilkan dalam realisasi tiap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai berikut.

1. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (1a-CP)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	16 %	46 %	46 %	75 %	75 %	100 %	100 %
Realisasi	17,18%	35,25 %	35,25 %	60,64 %	60,64 %	100,94 %	100,94 %
Capaian	107,08	78,83	78,83	80,85	80,85	100,94	100,94

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

No.	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi 2024	% Capaian 2024
A.	PPH non migas	474.023.762.000	482.950.804.161	101,88%	101,88%
B.	PPN dan PPNBM	408.403.901.000	392.256.425.471	96,05%	96,05%
C.	PBB	83.389.707.000	99.709.628.945	119,57%	119,57%
D.	Pajak Lainnya	19.500.000	5.609.763	28,77%	28,77%
E.	PPH Migas	-	-	0,00%	0,00%
Total		965.836.870.000	974.922.468.340	100,94%	100,94%

Sumber: Dashboard Revenue Manajemen 31 Desember 2024

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 974.922.468.340 dari target yang diamanatkan kepada KPP Pratama Kolaka yaitu Rp. 965.836.870.000, dengan capaian sebesar 100,94%.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	107,43%	92,43%	138,08%	105,04%	100,94%

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka tahun 2024 terdapat kenaikan dibanding dengan tahun 2023 dari sisi nominal mengingat target yang diamanatkan juga lebih tinggi, jika dibandingkan dari segi persentase capaian penerimaan maka tahun 2024 lebih kecil dibanding tahun 2023. Namun secara keseluruhan penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka untuk tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelum-sebelumnya.

- c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	-	100%	100,94%

Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin membaik, selain itu peningkatan pesat pada penerimaan pajak sektor PBB juga mendorong tercapainya iku tersebut. Hal tersebut juga didukung oleh peningkatan lumayan tinggi dari sektor PBB.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,94%

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka sampai dengan Desember 2024 mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah diamanatkan, hal ini didukung oleh jenis pajak PPh non migas dan PBB yang mengalami pertumbuhan positif.

e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kolaka untuk menunjang capaian realisasi penerimaan pajak diantaranya yaitu melaksanakan pengawasan kepatuhan terhadap wajib pajak secara maksimal, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak secara rutin, melaksanakan bedah wajib pajak bersama seksi seksi terkait untuk menciptakan kolaborasi dalam rangka penggalian potensi wajib pajak, dan kerja sama antar seksi pengampu penerimaan pajak dalam melaksanakan kunjungan wajib pajak dan penggalian potensi wajib pajak. Serta kerja sama antara pemeriksa dan penilaian untuk melakukan pemeriksaan PBB terhadap wajib pajak berpotensi.

Capaian penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi yang berjalan di masyarakat serta kebijakan yang ditetapkan. Selain itu didukung juga oleh adanya reformasi perpajakan sebagaimana adanya UU HPP seperti adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, serta PMSE, dan aktivitas PPM dan PKM yang dikelola dengan efektif. Meskipun target penerimaan pajak dapat di capai oleh KPP Pratama Kolaka, namun terdapat beberapa kendala antara lain, penerapan berbagai aturan terbaru dalam UU HPP tidak semerta merta dapat diterapkan secara efektif dan menyeluruh untuk seluruh wajib pajak KPP Pratama Kolaka. Kurang meratanya pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan dan juga akses teknologi menjadi kendala selama tahun 2024 ini. Selain itu kendala yang dihadapi KPP Pratama Kolaka dalam penerimaan pajak tahun 2024 ini adalah RKAB belum turun yang menyebabkan wajib pajak sector pertambangan tidak dapat beroperasi yang berdampak pula terhadap wajib pajak sector jasa konstruksi dan jasa transportasi sehingga penerimaan pada semester pertama tersendat. Upaya yang dilakukan organisasi untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan semaksimal mungkin untuk mengedukasi wajib pajak terkait peraturan dan program DJP yang baru. Serta membangun komunikasi positif kepada wajib pajak wajib pajak pertambangan sebagai bentuk pengawasan kepatuhan wajib pajak.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kepatuhan wajib pajak serta data wajib pajak dengan membentuk komite kepatuhan Wajib Pajak tingkat KPP. Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka Tahun 2025 Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka. 	2025

2. IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	95	89	89	96.67	96.67	100.79	100.79
Capaian	95	89	89	96.67	96.67	100.79	100.79

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor

▪ Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

▪ Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

a. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

b. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan

PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

▪ Formula IKU

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:	
(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)	
Komponen pertumbuhan nasional =	
$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$	
Komponen pertumbuhan unit kerja =	
$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$	
Catatan	
$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$	
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:	
Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$

▪ Realisasi IKU

No.	Komponen	% Realisasi 2024
A.	Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	115,57%
B.	Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	90%
Realisasi IKU		100,79%
Capaian IKU		100.79

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas telah melebihi target yang ditentukan dengan persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 115,57% dan persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas sebesar 90%, sehingga realisasi IKU yang dicapai adalah 100,79%. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas tidak maksimal dikarenakan perencanaan penerimaan rutin bergeser jauh dari prognosa yang disebabkan oleh Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sector pertambangan belum terbit.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	120	94.86	112.86	111.49	100.79

Sumber: Aplikasi Mandor

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 mengalami penurunan disbanding dengan 2 tahun sebelumnya. Hal tersebut karena Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas tidak maksimal. Yang disebabkan oleh perencanaan penerimaan rutin bergeser jauh dari prognosa karena Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sector pertambangan belum terbit yang menyebabkan wajib pajak sector pertambangan tidak dapat beroperasi.

- c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan yaitu di angka 100,79% dari target 100%. Capaian atas IKU tersebut kurang maksimal dikarenakan pada komponen proyeksi perencanaan kas tidak mencapai angka maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh perencanaan penerimaan rutin KPP Pratama Kolaka yang bergeser terlalu jauh dari proyeksi. KPP Pratama Kolaka melakukan berbagai upaya untuk mencapai target IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas antara lain optimalisasi fungsi pengamatan sehingga dapat diperoleh data dan informasi terkait kegiatan usaha wajib pajak yang dapat digunakan untuk melakukan penggalan potensi pajak. Serta melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan Direkotrat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), Inspektorat Jnederal (Itjen), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta sinergi dengan instansi lain melalui tim Bersama pengawasan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPKP.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kepatuhan wajib pajak serta data wajib pajak dengan membentuk komite kepatuhan Wajib Pajak tingkat KPP. Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka Tahun 2025 Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka. Optimalisasi kegiatan pengamatan dan kolaborasi antar bagian untuk melakukan penggalan potensi pajak 	2025

3. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	16%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	16,64%	35,81%	35,81%	62,03%	62,03%	100,23%	100,23%
Capaian	104	77.85	77.85	82.71	82.71	100.23	100.23

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Defisini IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	867.453.809.000	869.412.282.257	100,23%	100.23

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember Tahun 2024 telah mencapai sebesar Rp. 869.412.282.257 dari target yang diamanatkan kepada KPP Pratama Kolaka yaitu RP. 768.453.809.000 dengan capaian realisasi yaitu 100,23%.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	92,72%	141,62%	109,94%	100,23%

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka dari kegiatan PPM tahun 2024 terdapat penurunan dari dua tahun sebelumnya hal tersebut seiring dengan penambahan target yang diamanatkan kepada KPP Prtatama Kolaka setiap tahunnya. Jika dibandingkan dari segi persentase capaian penerimaan maka tahun 2024 lebih kecil dibanding dua tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan secara nominal penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka dari kegiatan PPM untuk tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelum-sebelumnya seiring dengan naiknya target yang diberikan.

- c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	-	100%	100,23%

Sumber: Aplikasi Mandor Data Tahun 2024

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) tahun 2024 telah melebihi target tahun 2024 yang tercantum pada perjanjian kinerja, renstra DJP Tahun 2020-2024 serta renja DJP Tahun 2024 yaitu ada di angka 100,23%.

- d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) telah mencapai target yang ditentukan dengan capaian realisasi yaitu 100,23%. Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kolaka untuk mendukung tercapainya IKU tersebut, antara lain yaitu:

1. Pengawasan pembayaran dan penyeteroran pajak untuk tahun berjalan, khususnya wajib pajak sectoral prioritas KPP seperti wajib pajak pertambangan bijih nikel, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, serta industry gula pasir serta wajib pajak dengan KLU administrasi pemerintahan dan jamisan sosial, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
2. Peningkatan pengawasan pembayaran PPH Pasal 25 dengan memperhatikan perkembangan ekonomi (dinamisasi angsuran pajak)
3. Optimalisasi penerbitan STP Tahun berjalan
4. Pengawasan atas pelaporan pajak instansi pemerintah dan pelaksanaan APBN/APBD/APBDes sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022
5. Pemanfaatan data pemicu dan data penguji tahun berjalan

- e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kepatuhan wajib pajak serta data wajib pajak dengan membentuk komite kepatuhan Wajib Pajak tingkat KPP. 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka Tahun 2025 • Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka. • Optimalisasi kegiatan pengamatan dan kolaborasi antar bagian untuk melakukan penggalan potensi pajak 	
---	--

4. IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	87.05%	97.49%	97.49%	103.29%	103.29%	116.41%	116.41%
Capaian	120	120	120	114.77	114.77	116.41	116.41

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor Data Tahun 2024

▪ Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

▪ Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi: SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan dan SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
 - c. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
 - d. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	37.665	43.846	116,41%	116.41

Sumber: Aplikasi Mandor Data Tahun 2024

IKU presentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 telah melebihi target yang ditentukan yaitu diangka 116,41% dengan realisasi SPT terlapor mencapai 43.846 dari target 37.665.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	89,46%	115,46%	127,02%	101,91%	116,41%

Sumber: Aplikasi Mandor Data Tahun 2024

Realisasi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi selama lima tahun ini mengalami kenaikan dan penurunan. Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu di angka 116,41% dari realisasi tahun 2023 yang berada di angka 101,91%. Hal tersebut

menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Kolaka untuk tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tercapainya IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak luput dari berbagai upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kolaka, diantaranya yaitu

1. pembentukan satuan tugas SPT Tahunan yang disebar ke berbagai titik di wilayah tugas KPP Pratama Kolaka
2. optimalisasi peran penyuluhan dalam memberikan edukasi terhadap kewajiban wajib pajak yang harus dilaksanakan terkait dengan pelaporan SPT
3. pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan baik dengan metode penyuluhan langsung, tidak langsung, maupun melalui pihak ketiga (Renjani, BDS, serta Inklusi Kesadaran Pajak) antara lain sosialisasi peraturan/kebijakan perpajakan, kelas pajak, pelatihan pengisian SPT Tahunan, dan lain sebagainya.
4. Optimalisasi layanan perpajakan melalui pojok pajak, kelas pajak, Mall Pelayanan Publik, dan layanan jemput bola penerimaan SPT Tahunan misalnya membuka pojok konsultasi atau pelaporan di instansi-instansi pemerintah daerah di wilayah kerja KPP Pratama Kolaka
5. Pelaksanaan imbauan penyampaian SPT Tahunan dan pemeritahuan peraturan perpajakan baru melalui SMS, WA/ email blast

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan strategi atau rencana yang akan dilakukan untuk menyambut masa pelaporan SPT Tahunan dan juga aplikasi coretax • Menciptakan Kerjasama dan kolaborasi antar lini untuk melaksanakan penagwasan kepatuhan pelaporan wajib pajak • Melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menunjang atau meningkatkan tingkat pelaporan SPT Wajib Pajak seperti pojok pelaporan, pojok pajak, kelas pajak, sosialisasi, dan penyuluhan 	2025

5. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	22.68%	30.38%	30.38%	48.65%	48.65%	107.23%	107.23%
Capaian	90.72	60.76	60.76	64.87	64.87	107.23	107.23

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi Mandor Data Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	% Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	98.383.061.000	105.500.906.353	107.23%	107.23

Sumber: Aplikasi Mandor Data Tahun 2024

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka mendapatkan amanat target penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material (PKM) sebesar Rp. 98.383.061.000 dimana atas target tersebut sampai dengan akhir desember 2024 telah mencapai realisasi sebesar Rp. 105.500.906.353. IKU Persentasi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan pengujian kepatuhan material (PKM) tahun 2024 mencapai 107,23%. Sector pertambangan dan penggalian merupakan sector dengan penyumbang PKM paling besar.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	89.68%	103.85%	74.89%	107.23%

Sumber: Aplikasi Mandor Data Tahun 2024

Tren persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) selama empat tahun ini Sebagian besar mengalami kenaikan, hanya mengalami penurunan di tahun 2023. Realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan realisas di beberapa sector seperti sector perdagangan besar, industry pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, serta jasa konstruksi. Realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Tahun 2024 mencapai angka 107,23%.

- c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	-	100%	107.23%

Sumber: Aplikasi Mandor Data Tahun 2024

Realisasi kinerja IKU Persentase Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 mencapai 107,23% telah melebihi target yang ditetapkan baik target dalam Renstra maupun target Renja DJP.

- d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Kolaka dalam mencapai target IKU Persentase Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan pengawasan dan penyetoran pajak terhadap wajib pajak yang belum pernah dilakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan
2. Optimalisasi fungsi pengamatan sehingga dapat diperoleh data dan informasi terkait kegiatan usaha wajib pajak yang dapat digunakan untuk penggalan potensi pajak
3. Pengawasan pembayaran dan penyetoran pajak, khususnya terhadap wajib pajak sectoral prioritas KPP yang memperhatikan Ability to Pay (ATP), data pemicu dan data penguji, serta histori treatment sebelumnya
4. Optimalisasi kegiatan kolaborasi penegakan hukum dengan PPNS agar wajib pajak melakukan pembetulan SPT disertai dengan pembayaran
5. Pengawasan atas wajib pajak grup besar dengan Efficiency Tax Rate <15%, mengalami kerugian, dan/atau melaporkan SPT Masa PPN dengan status LB Kompensasi
6. Pelaksanaan kegiatan program sinergi Kementerian Keuangan berupa joint analysis serta pemanfaatan data BC 4.0
7. Percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta sinergi dengan instansi lain melalui tim bersama pengawasan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPKP.
8. Pengawasan atas pelaporan dan pembayaran WP Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan non UMKM, terutama pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
9. Pengawasan atas pelaporan dan pembayaran WP Baru hasil ekstensifikasi
10. Percepatan tindak lanjut atas data-data yang mendekati daluwarsa dengan prosedur sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kepatuhan wajib pajak serta data wajib pajak dengan membentuk komite kepatuhan Wajib Pajak tingkat KPP. • Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka Tahun 2025 • Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka. • Optimalisasi kegiatan pengamatan dan kolaborasi antar bagian untuk melakukan penggalan potensi pajak • Mengevaluasi dan menerapkan Kembali strategi strategi tahun selama tahun 2024 yang berhasil membantu tercapainya IKU Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM 	2025

6. IKU Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	19,46%	54,84%	54,84%	62,09%	62,09%	88,80%	88,80%
Capaian	120	120	120	103.48	103.48	120	120

Sumber: Aplikasi Mandor Data Tahun 2024

▪ Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

▪ Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Formula IKU

Formula:
$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$

Realisasi IKU

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi						Progress				
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
		Capaian	Rasio (18,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
815	PRATAMA KOLAKA	100.00 %	18.50 %	77.82 %	28.12 %	68.05 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	105.99 %	120.00 %

Sumber: Aplikasi Mandor Data Tahun 2024

Realisasi atas IKU Persentase PERUBAHAN Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan tahun 2024 telah melebihi target yang ditentukan dengan capaian maksimal 120%. Target yang ditentukan untuk IKU tersebut adalah sebesar 74% dan untuk realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai angka 88,80% sehingga capaian atas realisasi IKU tersebut adalah 120% dengan kata lain tercapai secara maksimal.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	-	-	-	84.00%	88.80%

Sumber: Aplikasi Mandor Data Tahun 2024

IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dari angka realisasi tahun 2023 sebesar 84% dan pada tahun 2024 ini mencapai 88,80%. Hal tersebut menggambarkan wajib pajak melakukan pelaporan dan pembayaran setelah dilaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan terkait dengan kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Kolaka untuk emncapai target realisasi IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan adalah sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan edukasi Pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan baik dengan metode penyuluhan lanngsung, tidak langsung, maupun melalui pihak ketiga (Renjani, BDS, serta Inklusi Kesadaran Pajak) meliputi antara lain sosialisasi peraturan/kebijakan perpajakan, kelas pajak/pelatihan pengisian SPT Tahunan, dsb
- b. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan asistensi, kerjasama dengan WP pemberi kerja, dan koordinasi dengan ILAP, misalnya melalui asistensi pengisian SPT kepada WP pemberi kerja dengan jumlah karyawan besar
- c. Optimalisasi layanan perpajakan melalui pojok pajak dan kelas pajak, Mal Pelayanan Publik, dan/atau layanan kemptu bola penerimaan SPT Tahunan
- d. Pelaksanaan imbauan penyampaian SPT Tahunan dan pemberitahuan peraturan perpajakan baru melalau SMS/WA/*Email Blast*.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi dan menerapkan kembali strategi tahun 2024 yang berhasil mendukung tercapainya IKU tersebut • Melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menunjang atau meningkatkan tingkat pelaporan SPT Wajib Pajak seperti pojok pelaporan, pojok pajak, kelas pajak, sosialisasi, dan penyuluhan • Optimalisasi kegiatan penyuluhan dan edukasi terhadap wajib pajak 	2025

7. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,01%	12,00%	12,00%	18,00%	18,00%	108,50%	108,50%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	108,50%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

▪ Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

▪ Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan

stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU
Indeks hasil survei
- Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	108,50%	108,50%

Sumber: Aplikasi Mandor Data Tahun 2024

Realisasi atas IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tahun 2024 mencapai angka 108,50% telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	77,34%	80,40%	80,40%	82,97%	108,50%

Sumber: Aplikasi Mandor Data Tahun 2024

Tren realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan mengalami kenaikan setiap tahun dari tahun 2020, dan mencapai kenaikan signifikan di tahun 2024 ini. Hal tersebut menggambarkan bahwa pelayanan dan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Kolaka mengalami perbaikan setiap tahun dilihat dari hasil survey atas kepuasan stakeholder KPP Pratama Kolaka.

- c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	81%	100%	-	100%	108,50%

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi atas IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan telah mencapai target yang ditentukan baik target dalam Renstra DJP, target dalam Renja DJP, maupun target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu ada di angka 108,50%

- d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Kolaka dalam mencapai target realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan antara lain Pelaksanaan edukasi Pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan baik dengan metode penyuluhan langsung, tidak langsung, maupun melalui pihak ketiga (Renjani, BDS, serta Inklusi Kesadaran Pajak) meliputi antara lain sosialisasi peraturan/kebijakan perpajakan, kelas pajak/pelatihan pengisian SPT Tahunan, dsb, Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan asistensi, kerjasama dengan WP pemberi kerja, dan koordinasi dengan ILAP, misalnya melalui asistensi pengisian SPT kepada WP pemberi kerja dengan jumlah karyawan besar, Optimalisasi layanan perpajakan melalui pojok pajak dan kelas pajak, Mal Pelayanan Publik, dan/atau layanan kempot bola penerimaan SPT Tahunan, dan Pelaksanaan imbauan penyampaian SPT Tahunan dan pemberitahuan peraturan perpajakan baru melalui SMS/WA/Email Blast.

- e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi dan menerapkan kembali strategi tahun 2024 yang berhasil mendukung tercapainya IKU tersebut Melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menunjang atau meningkatkan tingkat pelaporan SPT Wajib Pajak seperti pojok pelaporan, pojok pajak, kelas pajak, sosialisasi, dan penyuluhan 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kegiatan penyuluhan dan edukasi terhadap wajib pajak • Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dengan selalu mengevaluasi setiap masukan yang diberikan selama tahun 2024 	
---	--

8. IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	113,55%	113,55%	112,10%	112,10%	119,50%	119,50%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

▪ Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

▪ Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

• Formula IKU

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{pengawasan} \\
 \text{pembayaran masa}
 \end{array}
 =
 \begin{array}{l}
 (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak} \\
 \text{Strategis}) \\
 + \\
 (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak} \\
 \text{Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})
 \end{array}$$

- Realisasi IKU

IKU	Target 2024	% Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	119,50%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa tahun 2024 telah melebihi target yang di tentukan yaitu sebesar 119,50% dari target 90% sehingga capaian yang diperoleh atas IKU tersebut sebesar 120%.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	-	99,79%	106,24%	115,46%	119,5%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2024 ada di angka 119,50% naik sekitar 4,04% dari tahun 2023, hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat pengawasan pembayaran masa wajib pajak semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya.

- c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	100%	90%	-	100%	119,50%

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2024 telah melebihi target yang terdapat di Renstra DJP, Renja DJP, maupun di Perjanjian Kinerja KPP Pratama Kolaka yairu di angka 119,50%.

- d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Kolaka untuk mencapai target realisasi IKU Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2024 ini antara lain:

- a. Pengawasan pembayaran dan penyetoran pajak untuk tahun pajak berjalan, khususnya Wajib Pajak sektoral prioritas KPP (Pertambangan Bijih Nikel, Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya, serta Industri Gula Pasir)
 - b. Peningkatan pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 dengan memperhatikan perkembangan ekonomi (dinamisasi angsuran pajak)
 - c. Pengawasan pembayaran dan penyetoran pajak untuk tahun pajak berjalan, khususnya WP dengan KLU Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial; Perdagangan Besar dan Eceran; serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kepatuhan wajib pajak serta data wajib pajak dengan membentuk komite kepatuhan Wajib Pajak tingkat KPP. • Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka Tahun 2025 • Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Kolaka. • Optimalisasi kegiatan pengamatan dan kolaborasi antar bagian untuk melakukan penggalian potensi pajak 	2025

9. IKU Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	99,34%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	99,34%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas

Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen: Komponen Penelitian (40%) dan Komponen Tindak Lanjut (60%)

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen: Komponen Kuantitas (40%) dan Komponen Kualitas (60%)

• Formula IKU

$$\begin{aligned} & \text{Persentase penyelesaian} \\ & \text{permintaan penjelasan atas data} \\ & \text{dan/atau keterangan} \end{aligned} = \begin{aligned} & (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak} \\ & \text{Strategis}) \\ & + \\ & (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya} \\ & \text{(Berbasis Kewilayahan)}) \end{aligned}$$

• Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi IKU Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tahun 2024 telah melebihi target yang ditentukan yaitu di angka 120% dari target 100%, sehingga capaian atas IKU tersebut adalah 120% atau tercapai secara maksimal.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

Selama lima tahun kebelakang realisasi atas IKU Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan selalu tercapai secara maksimal di angka 120%. KPP Pratama Kolaka dapat mempertahankan kinerja baik katas IKU tersebut selama 5 tahun kebelakang.

- c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100%	100%	-	100%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor Data Tahun 2024

Realisasi atas IKU Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Tahun 2024 telah melebihi target yang ditentukan baik target dalam Renstra DJP 2020-2024, Renja DJP Tahun 2024, maupun Perjanjian Kinerja KPP Pratama Kolaka Tahun 2024 yaitu di angka maksimal sebesar 120% dari target 100%.

- d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Kolaka untuk mendukung tercapainya IKU Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan penerbitan LHPt, SP2DK, dan LHP2DK yang termasuk ke dalam Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak
- b. Percepatan tindak lanjut atas data-data yang mendekati daluwarsa dengan prosedur sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret
- c. Menindaklanjuti data pemicu dan/atau data penguji

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap tindak lanjut LHPt Wajib Pajak dalam DPP Optimalisasi kegiatan pengamatan dan kolaborasi antar bagian untuk melakukan penggalan potensi pajak Mengevaluasi dan menerapkan Kembali strategi strategi tahun selama tahun 2024 yang berhasil membantu tercapainya IKU Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 	2025

10. IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	118,00%	115,68%	115,68%	116,20%	116,20%	120,00%	120,00%
Capaian	118,00%	115,68%	115,68%	116,20%	116,20%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2. Pemanfaatan Data Matching

Pemanfaatan data matching adalah jumlah WP yang memiliki data pemicu dan data konkret selain tahun berjalan.

• Formula IKU

(persentase pemanfaatan data STP + persentase data mastching) : 2

• Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan yaitu di angka 120% dari target 100%, sehingga capaian atas IKU tersebut maksimal di angka 120%

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dimulai dari tahun 2023. Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 ini selalu dalam capaian maksimal yaitu di angka 120%, hal tersebut menggambarkan bahwa KPP Pratama Kolaka dapat mempertahankan kinerja baiknya dalam pencapaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan tersebut.

- c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tercapaiannya IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan KPP Pratama Kolaka untuk menunjang tercapainya IKU tersebut antara lain:

1. Menindaklanjuti STP yang termasuk ke dalam daftar nominatif tepat waktu
2. Pemanfaatan data pemicu selain tahun berjalan
3. Pemanfaatan data konkret wajib pajak selain tahun berjalan
4. Tindak lanjut data matching antara wajib pajak yang memiliki data pemicu dan data konkret selain tahun berjalan.

- d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan strategi-strategi untuk mencapai IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan selama tahun 2025 • Mengevaluasi dan menerapkan Kembali strategi strategi tahun selama tahun 2024 yang berhasil membantu tercapainya IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan 	2025

11. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	100,67%	100,67%	119,44%	119,44%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	100,67%	100,67%	119,44%	119,44%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Komponen 3 Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM

Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

- **Formula IKU**
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
+ 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
- **Realisasi IKU**

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	100%	119,44%	119,44

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu KPP Pratama Kolaka Tahun 2024 telah melebihi target yang ditentukan yaitu di angka 119,44% dari target 100%

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	-	-	-	-	119,44%

Sumber: Aplikasi Mandor

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga tidak ada perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya. Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu Tahun 2024 adalah sebesar 119,44%.

- c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tercapainya IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan KPP Pratama Kolaka untuk menunjang tercapainya IKU tersebut antara lain:

1. Melaksanakan rapat kepatuhan secara rutin
2. Menyampaikan laporan Komite Kpetuhan KPP Pratama Kolaka tepat waktu
3. Menjaga kualitas pelaksanaan Komite Kepatuhan KPP Pratama Kolaka dalam hal pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan
4. Menyiapkan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Komite Kpetuhan Tingkat KPP Merencanakan strategi untuk mencapai IKU terkait dengan Komite Kepatuhan Mengevaluasi strategi yang sudah diterapkan selama tahun 2024 yang berhasil mendukung tercapainya IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan untuk dapat di kembangkan dan diterapkan kembali di tahun 2025 	2025

12. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	119,22%	119,22%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	119,22%	119,22%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

• Formula IKU

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)

+

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	119,22%	119,22

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

Realisasi atas IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 mencapai angka 119,22% dari target yang ditentukan untuk tahun 2024 ayutu sebesar 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	92%	105,78%	109,75%	110,41%	119,22%

Sumber: Aplikasi Mandor

Tren realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2020 sebesar 92% sampai pada realisasi tahun 2024 sebesar 119,22%. Hal ini menandakan kinerja efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Kolaka semakin baik tiap tahunnya.

- c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Kolaka untuk mencapai realisasi atas IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pencarian bahan baku pemeriksaan yang berkualitas untuk tahun pajak 2021-2023 dengan pembuatan Kertas Kerja Analisis bagi Pemeriksa
2. Optimalisasi prosedur pemeriksaan, dasar hukum dan temuan hasil pemeriksaan
3. Melakukan pendampingan kolaboratif dengan pengawasan atas Wajib Pajak tertentu
4. Melakukan koordinasi dengan Pengawasan untuk melakukan usulan pemeriksaan yang berkualitas
5. Melakukan koordinasi dengan Pengawasan untuk Wide Revenue Activities atas mirroring hasil pemeriksaan
6. Melakukan koordinasi dengan tim Pengamat atas hasil Pengamatan Wajib Pajak untuk tindak lanjut pemeriksaan
7. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah atas data dan petunjuk atas kasus-kasus tertentu dalam pemeriksaan
8. Melakukan optimalisasi Pemeriksaan PBB
9. Melakukan koordinasi dengan Tim Penilai PBB termasuk asisten penilai, untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan PBB dan Penilaian

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pencarian dan filter bahan baku pemeriksaan agar lebih berkualitas Optimalisasi kegiatan pengamatan dan kolaborasi antar bagian untuk melakukan penggalan potensi pajak untuk pemeriksaan dan penilaian Mengevaluasi dan menerapkan Kembali strategi strategi selama tahun 2024 yang berhasil membantu tercapainya IKU tersebut 	2025

13. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	38,43%	71,09%	71,09%	91,48%	91,48%	118,20%	118,20%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- Variabel tindakan penagihan (50%);
- Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

• Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) +$
 $(20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) +$
 $(30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

- Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	118,20%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

Realisasi tahun 2024 untuk IKU Tingkat Efektivitas Penagihan ada di angka 118,20% dari target yang telah ditentukan sebesar 75% sehingga capai atas IKU Tingkat Efektivitas Penagihan mencapai angka maksimal sebesar 120%

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	110,24%	112,64%	107,94%	118,20%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

Tren realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai tahun 2024, mengalami penurunan di tahun 2023.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Kolaka untuk mencapai realisasi atas IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan tindakan penagihan atas WP DSPC sampai dengan penyitaan atau lunas.
2. Clusterring WP dan PP berdasarkan besar utang pajak dan tingkat kepatuhan:
3. Utang pajak s.d 20 juta dihimbau via WA blast
4. Utang Pajak diatas 20 juta dibuatkan surat himbauan pelunasan utang pajak
5. Apabila kooperatif dilakukan tindakan secara persuasif dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah penagihan aktif
6. Apabila tidak kooperatif dilakukan tindakan secara represif penegakan hukum
7. Melakukan kegiatan pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka pembahasan penyelesaian utang pajak.
8. Mendorong pelunasan utang pajak Instansi Pemda melalui koordinasi dengan Sekda maupun Inspektorat Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan permintaan dan tindak lanjut data:
10. Rincian rekening ke PPATK
11. Akta pendirian/perubahan ke notaris apabila tidak ditemukan data pada portal AHU
12. Melakukan usulan blokir atas:
13. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
14. Rekening WP di LJK dengan memanfaatkan data Coretax, Approweb, LHP, dsb.
15. Menganalisis kembali Subjek dan Objek yang akan dilakukan tindakan penagihan dan memastikan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.
16. Melakukan pengawasan terhadap STP/SKP yang telah jatuh tempo dan/atau akan daluwarsa tindakan penagihan.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan tindakan penagihan atas WP DSPC sampai dengan penyitaan atau lunas. • Mendorong pelunasan utang pajak Instansi Pemda melalui koordinasi dengan Sekda maupun Inspektorat Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Mengevaluasi dan menerapkan kembali disertai pengembangan atas strategi-strategi yang telah dilakukan di tahun 2024 dan berhasil mendukung tercapainya iku tersebut 	2025

14. IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• Defisini IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan kpp Pratama Kolaka Tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100% dari target 100%, dengan capaian sebesar 100%

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan baru ada di tahun 2024, dengan realisasi sebesar 100%. Target penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di tetapkan minimal satu dalam satu tahun dan KPP Pratama Kolaka menyampaikan satu usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disetujui dan diterbitkan SPPBP.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan seperti melakukan pembahasan bersama terkait dengan wajib pajak yang dapat diusulkan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan, mengumpulkan berbagai informasi dan data yang diperlukan untuk pengusulan agar sesuai dengan ketentuan dan dapat diterima oleh Kanwil.

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan di tahun 2025 Menyiapkan beberapa usulan pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas 	2025

15. IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	27,71%	82,50%	82,50%	97,29%	97,29%	115,00%	115,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	115,00%	115,00%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Defisini IKU
IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
 - Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan
Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.
 - Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

- Formula IKU

(persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan + persentase penyediaan data potensi perpajakan)	X 100%
2	

- Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	115%	115%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan Tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 115% dari target 100% sebagaimana tertampil dalam tabel realisasi IKU diatas.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	168,28%	153,74%	197,5%	120%	115%

Sumber: Aplikasi Mandor

Dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa tren realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan selama lima tahun kebelakang mengalami kenaikan dan penurunan namun masih di atas target yang ditentukan.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Kolaka dalam mencapai target realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan antara lain membentuk tim pengamatan KPP Pratama Kolaka, melakukan pengamatan terhadap wajib pajak yang berpotensi, dan melaporkan kegiatan dan hasil pengamatan tepat waktu, dan melaksanakan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL).

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan strategi untuk mencapai target IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan Mengevaluasi dan menerapkan kembali strategi-strategi tahun 2024 yang berhasil menunjang tercapainya IKU tersebut 	2025

16. IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	42,52%	48,19%	48,19%	54,92%	54,92%	97,23%	97,23%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Defisini IKU
IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

- Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	55%	97,23%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

Realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP KPP Pratama Kolaka Tahun 2024 telah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 97,23% dari target 55% sehingga capaian atas IKU tersebut adalah 120% atau tercapai secara maksimal. Hal tersebut didukung oleh penghimpunan data regional ILAP yang dilaksanakan secara maksimal dan tepat waktu.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	-	-	-	88,53%	97,23%

Sumber: Aplikasi Mandor

IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP baru dimulai tahun 2023, dari tahun 2023 sampai tahun 2024 realisasi atas IKU tersebut semakin baik. Tahun 2023 realisasi atas IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP sebesar 88,53% dan realisasi atas IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP tahun 2024 sebesar 97,23, terjadi kenaikan sampai dengan 8,7%.

- c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Kolaka dalam mencapai IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP antara lain bekerja sama dengan pemerintah daerah di wilayah kerja KPP Pratama Kolaka, KP2KP Rumbia, dan KP2KP Lasusua terkait dengan data ILAP dan mengirim laporan terkait ILAP tepat waktu.

- d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana strategis untuk mencapai target realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP • Mengevaluasi dan menerapkan kembali strategi yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 yang berhasil 	2025

mendukung tercapainya IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP <ul style="list-style-type: none"> Menjalin kerja sama dengan pemerintahan setempat terkait dengan data regional ILAP 	
--	--

17. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	114,45	114,45	117,05	117,05
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	114,45%	114,45%	117,05%	117,05%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Defisini IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

- Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	117,05	117,05%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,05%

Sumber: Aplikasi Mandor

- c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya yang dilakukan KPP Pratama Kolaka untuk mendukung tercapainya IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM:

- Memberikan informasi dan pengingat kepada setiap pegawai untuk memenuhi capaian jam pelajaran
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan kebinntalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- Melaksanakan pelaporan kegiatan kebinntalan tepat waktu
- Melakukan pengawasan atas uji kompetensi yang diikuti oleh pegawai
- Melaksanakan pengembangan terhadap pegawai yang tidak lulus dalam uji kompetensi maupun assestment center dengan melaksanakan pengawasan di setiap kegiatan pengembangan yang dilakukan.

- d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun agenda kebinntalan selama satu tahun kedepan secara detail dan terstruktur • Penyebaran informasi kepada pegawai apabila terdapat uji kompetensi yang dapat diikuti • Mengevaluasi dan menerapkan kembali strategi yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 yang berhasil mendukung tercapainya IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan 	2025

18. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi				100	100	97,95	97,95
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	115,24%	115,24%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Defisini IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	97,95%	115,24%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Kolaka Tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan yaitu di angka 97,95% dari target 85% sehingga capaian atas IKU tersebut adalah sebesar 115,24%.

b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	98,8%	95,94%	95,98%	97,95%

Sumber: Aplikasi Mandor

Tabel diatas merupakan tabel perbandingan realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Kolaka selama empat tahun kebelakang. Megalami

penurunan sekali pada tahun 2022, namun setelahnya mengalami kenaikan terus menerus hingga tahun 2024 ini, realisasi pada tahun 2024 ini adalah sebesar 97,95%. Hal tersebut menggambarkan integritas KPP Pratama Kolaka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.

c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Kolaka untuk mendukung tercapainya IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengadakan sosialisasi rutin terkait dengan integritas dalam melaksanakan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan maupun penagihan kepada wajib pajak
2. Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak
3. Menolak setiap pemberian wajib pajak dan melaporkannya kepada UPG Internal unit apabila mendapatkan pemberian dari wajib pajak.
4. Selalu mengedukasi wajib pajak bahwa setiap layanan yang diberikan oleh KPP Pratama Kolaka tidak dipungut biaya sepersenpun

d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan program pengendalian integritas yang akan dilaksanakan selama setahun kedepan • Mengevaluasi program dan strategi yang dilakukan selama tahun 2024 untuk dapat dikembangkan dan diterapkan kembali di tahun 2025 	2025

19. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	48,60	57,20	57,20	87,67	87,67	100	100
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	111,11%	111,11%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Defisini IKU

A. Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
2. Indeks kualitas pengelolaan kinerja

B. Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- Formula IKU
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko
- Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90%	100%	111,11%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

Realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko KPP Pratama Kolaka Tahun 2024 telah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 100% dari target 90% sehingga capaian atas IKU tersebut adalah 111,11%. Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan setiap kegiatan DKRO dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100%	96,97%	100%	100%	100%

Sumber: Aplikasi Mandor

Tren realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko selama lima tahun kebelakang Sebagian besar berada di angka 100%, mengalami penurunan sekali pada tahun 2021.

- c. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tercapainya IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Kolaka, antara lain:

1. Melaksanakan pemantauan kinerja organisasi dan risiko organisasi melalui pelaksanaan Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi setiap triwulan
2. Menyampaikan pelaporan atas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Risiko Organisasi tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi nilai kinerja organisasi dan mitigasi risiko setiap dua minggu sekali.

- d. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan strategi-strategi untuk tahun 2025 agar pemantauan Nilai Kinerja Organisasi dan Mitigasi Risiko menjadi lebih teratur • Mengevaluasi strategi-strategi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 yang berhasil mendukung tercapainya IKU Indeks Efektivitas Implementasi Kinerja dan Manajemen Risiko untuk dapat diterapkan kembali dan dilakukan penyempurnaan di tahun 2025 	2025

20. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	100,00	100,00	120	120	120	120
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Defisini IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00		
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)		
100	Realisasi IKPA = 95		
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)		
80	Realisasi IKPA = 85		
79,9	Realisasi IKPA < 85		

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 - Target IKPA) / (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target)
= (98-95) / (120-100)

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA - Realisasi IKPA capaian 80) / (indeks capaian target - indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

- Realisasi IKU

IKU	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor Tahun 2024

Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPP Pratama Kokaka Tahun 2024 tercapai secara maksimal di angka 120% dari target 100%, hal tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran KPP Pratama Kolaka terpantau dan dilaksanakan dengan baik.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran			94,25%	99,75%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran mulai ada sejak tahun 2022, selama tiga tahun kebelakang realisasi atas IKU tersebut selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2022 sebesar 94,25%, kemudian di tahun 2023 naik menjadi 99,75%, dan pada tahun 2024 mencapai realisasi maksimal sebesar 120%. Hal tersebut menggambarkan bahwa perencanaan dan penggunaan anggaran KPP Pratama Kolaka dilakukan dengan baik.

- c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 RPJM	Target Tahun 2024 Pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	95,5	-	100	120

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan dalam Renja DJP Tahun 2024 dan target dalam Perjanjian Kinerja KPP Pratama Kolaka Tahun 2024. Dimana target dalam Renja

ditentukan sebesar 95.5, dan target dalam perjanjian kinerja sebesar 100, dan realisasi yang dicapai pada tahun 2024 ini sebesar 120.

d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tercapainya IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan KPP Pratama Kolaka untuk menunjang tercapainya IKU tersebut, diantara adalah

1. Pemantauan secara rutin atas penggunaan anggaran KPP Pratama Kolaka
2. Optimalisasi setiap mata anggaran
3. Evaluasi rutin terkait dengan program maupun kegiatan yang dibiayai oleh DIPA Kantor bersama tim pengelola keuangan

e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan menggunakan anggaran selama tahun 2025 • Melakukan evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran Bersama tim keuangan • Mengevaluasi strategi-strategi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024 yang berhasil mendukung tercapainya IKU Indeks Kualitas Penggunaan Anggaran untuk dapat diterapkan kembali dan dilakukan penyempurnaan di tahun 2025 	2025

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) digunakan untuk pembiayaan program peningkatan dan pengamanan penerimaan sebagaimana ditampilkan dalam data sebagai berikut.

Uraian DIPA	Pagu Netto	Target	Realisasi	Realisasi Pagu	Capaian dari Target
DIPA tahun 2024	Nominal	Nominal	Nominal	%	%
- Belanja Pegawai	648.788.000	616.348.600	648.414.000	99.94	100
- Belanja Barang	6.449.631.000	5.804.667.900	6.131.803.297	95.07	100
- Belanja Modal	327.994.000	295.194.600	312.655.441	95.32	100
Jumlah DIPA Tahun 2024	7.426.413.000	6.716.247.100	7.092.872.738	95.31	100

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pembiayaan terkait pemenuhan kebutuhan perkantoran yang berhubungan dengan karyawan yang terdiri dari belanja uang makan dan uang lembur pegawai. Realisasi anggaran sehubungan dengan penggunaan anggaran terkait dengan belanja pegawai adalah :

Uraian DIPA	Nominal
DIPA tahun 2024	7.426.413.000
Pagu Anggaran Belanja Pegawai	648.788.000
Realisasi Anggaran	648.144.000
Persentase Realisasi Anggaran dari pagu	99,90%

Dengan uraian realisasi per mata anggaran adalah sebagai berikut:

Mata Anggaran	Pagu	Realisasi	Realisasi Pagu (%)
Belanja uang makan PNS	595.103.000	594.580.000	99.91
Belanja Lembur	53.685.000	53.564.000	99.77
Jumlah Belanja Pegawai	648.788.000	648.144.000	99.90

2. Belanja Barang

Belanja barang digunakan untuk pembiayaan terkait pemenuhan kebutuhan perkantoran yang terdiri dari belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas/pos pusat, belanja honorarium satuan kerja, belanja barang operasional, belanja energi (listrik dan air), belanja langganan telepon, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta belanja perjalanan dinas. Berikut merupakan realisasi anggaran sehubungan dengan penggunaan anggaran terkait dengan belanja barang.

Uraian DIPA	Nominal
DIPA tahun 2024	7.426.413.000
Pagu Anggaran Belanja Barang	6.449.631.000
Realisasi Anggaran	6.131.803.297
Persentase Realisasi Anggaran	95,07%

Dengan uraian capaian per mata anggaran adalah sebagai berikut:

a. Sub Belanja Ekstensifikasi Penerimaan Negara

Mata Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentase
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Ekstensifikasi	263.570.000	261.134.260	99.08
Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	459.194.000	437.069.258	95.18
Jumlah Belanja	722.764.000	698.203.518	96.60

b. Sub Belanja Pelayanan, Komunikasi, Edukasi

Mata Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentase
Layanan dan Konsultasi Perpajakan	138.988.000	125.377.299	90.21
Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	301.211.000	244.493.628	81.17
Jumlah Belanja	440.199.000	369.870.927	84.02

c. Sub Belanja Pengawasan dan Penegakan Hukum

Mata Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentase
Dokumen Penagihan Aktif	259.475.000	255.486.205	98.46
Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	174.307.000	135.758.230	77.88
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	440.707.000	432.350.575	98.10
Laporan Penilaian	86.931.000	65.077.352	74.86
Jumlah Belanja	961.420.000	888.672.362	92.43

d. Sub Belanja Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Mata Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentase
Kerumahtanggaan	642.514.000	618.461.149	96.26
Layanan Perkantoran	3.672.473.000	3.546.334.741	96.57
Peralatan Fasilitas Perkantoran	10.261.000	10.260.600	100
Jumlah Belanja	4.325.248.000	4.175.056.490	96.53

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin serta belanja penambahan nilai gedung dan bangunan KPP Pratama Kolaka dengan rincian sebagai berikut.

Uraian DIPA	Nominal
DIPA tahun 2024	7.426.413.000
Pagu Anggaran Belanja Modal	327.994.000
Realisasi Anggaran	312.655.441
Persentase Realisasi Anggaran dari pagu	95,32%

Dengan uraian realisasi per mata anggaran adalah sebagai berikut:

Mata Anggaran	Pagu	Realisasi	Realisasi Pagu (%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.994.000	113.769.041	98.08
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	212.000.000	198.886.400	98.51
Jumlah Belanja Modal	327.994.000	312.655.441	95.32

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka melakukan efisiensi penggunaan berbagai sumber daya yang ada seperti pada bidang anggaran, sumber daya manusia, penggunaan atau pemanfaatan asset, serta teknologi dan informasi untuk mendukung siklus organisasi. Pada bidang anggaran efisiensi dilakukan untuk mencapai pengelolaan anggaran yang lebih

baik dengan mengalokasikan anggaran secara strategis sesuai dengan peruntukan yang tertera dalam FA detail anggaran KPP Pratama Kolaka sebagaimana dijelaskan secara singkat pada bagian realisasi anggaran.

Pada bidang sumber daya manusia, KPP Pratama Kolaka melakukan efisiensi dengan menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya masing-masing, mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan keahlian dan tugas masing-masing pegawai, melibatkan pegawai dalam berbagai acara dan kegiatan kantor untuk menciptakan solidaritas dan rasa kebersamaan serta semangat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam bidang penggunaan dan pemanfaatan asset KPP Pratama Kolaka melakukan efisiensi dengan memaksimalkan penggunaan asset yang ada untuk mendukung sepenuhnya kegiatan organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Sedangkan dalam bidang teknologi informasi KPP Pratama Kolaka juga melakukan efisiensi dengan cara menggunakan teknologi dan informasi dalam mengerjakan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan hasil yang maksimal.

D. Kinerja Lain-lain

Selama tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka mendapatkan beberapa penghargaan yaitu:

1. Penghargaan Direktorat Jenderal Pajak sebagai Unit dengan Kinerja Edukasi Terbaik Kedua Tingkat Nasional Tahun 2023-Klaster KPP Pratama
2. Penghargaan Direktorat Jenderal Pajak sebagai Jaringan Perubahan Reformasi Perpajakan Terbaik Ketiga Tahun 2023
3. Penghargaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara sebagai KPP dengan Pengelolaan Keuangan Terbaik III
4. Penghargaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara sebagai KPP dengan Kinerja Penagihan Terbaik II
5. Penghargaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara sebagai KPP dengan Kegiatan Penilaian Terbaik III
6. Penghargaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara sebagai KPP dengan Kegiatan Penilaian Terbaik III
7. Penghargaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara sebagai KPP dengan Kegiatan Penilaian Terbaik III

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Organisasi ini disusun berdasarkan Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan yang telah diturunkan (*cascade*) dari Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik. Hal ini karena didukung oleh komitmen dari seluruh unit kerja dalam mencapai sasaran.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama telah menyelesaikan seluruh kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka Tahun 2024 dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 110,22 dengan predikat istimewa. Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja KPP Pratama Kolaka mencapai target yang ditentukan.

Semoga dengan tercapainya seluruh IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka Tahun 2024 ini, seluruh seksi di KPP Pratama Kolaka dapat mempertahankan dan meningkatkan semangat serta kerja sama untuk mencapai Nilai Kinerja Organisasi yang lebih baik di tahun 2025.

LAMPIRAN

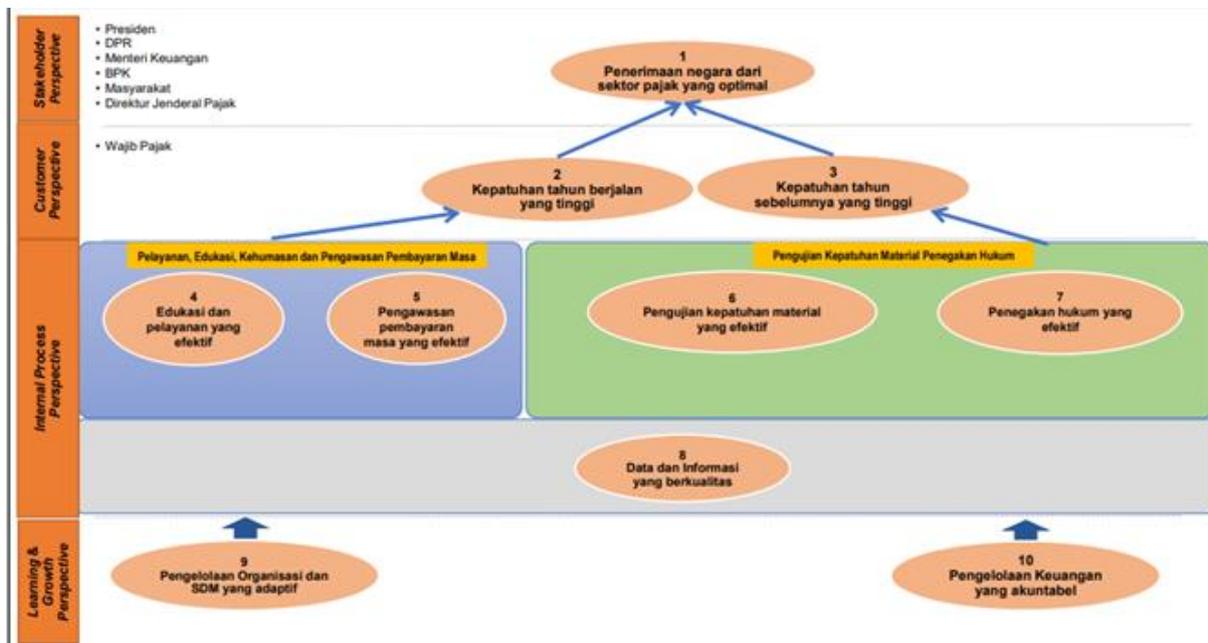


**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-14/WPJ.15/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
KOLAKA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN
TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOLAKA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.678.672.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 734.594.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 335.641.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 608.437.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 4.678.260.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 4.043.112.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 635.148.000
Total	Rp 6.356.932.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan,
Barat, dan Tenggara



Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Kuswanto

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kolaka



Ditandatangani Secara Elektronik
Arief Hartono



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOLAKA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	16%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	16%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Kendari, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kolaka,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arief Hartono



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOLAKA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Melaksanakan kegiatan bedah WP untuk saling bertukar informasi teknik penggalan potensi	Penyelesaian Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	12	Kegiatan	Januari-Desember	Kepala Seksi Pengawasan	-
		Melakukan pemantauan progres penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan per seksi dan per AR secara rutin	Penyelesaian Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	12	Kegiatan	Januari-Desember	Kepala Seksi Pengawasan	-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arief Hartono



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Arief Hartono, Ak., M.M.	NAMA	Heri Kuswanto, SE., Ak., M.Si.	
NIP	197003311990031001	NIP	196707081996031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



	Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara)			
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA	
7	Kolaboratif
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama
	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Arief Hartono
197003311990031001



Ditandatangani secara elektronik
Heri Kuswanto
196707081996031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	88 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	16%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	16%	46%	46%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Arief Hartono
197003311990031001

31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Heri Kuswanto
196707081996031001



